

---

## Penerapan PPDB Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif *Good Governance*

Fierda Nurany<sup>1</sup>, Syarifah Rahmania Safitri<sup>2</sup>, Ayu Tri Wulandari<sup>3</sup>,  
Robichah Miladiyah<sup>4</sup>, Adinda Tri Apriani<sup>5</sup>, Dinda Febriani Harianti<sup>6</sup>

email: [fierdanurany@ubhara.ac.id](mailto:fierdanurany@ubhara.ac.id)<sup>1</sup>, [syarifahsafitri@gmail.com](mailto:syarifahsafitri@gmail.com)<sup>2</sup>, [ayutriwulandari973@gmail.com](mailto:ayutriwulandari973@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rbicha06@gmail.com](mailto:rbicha06@gmail.com)<sup>4</sup>, [adindata2@gmail.com](mailto:adindata2@gmail.com)<sup>5</sup>, [fdinda136@gmail.com](mailto:fdinda136@gmail.com)<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Bhayangkara Surabaya

---

### *Abstract*

*The aims of the online-based PPDB zoning system is to analyze the application of the Surabaya City zoning system online in the perspective of good governance, to find out the positive and negative impacts of implementing the online zoning system PPDB. The government in the distribution of education one of which is issuing new policies in accepting new student admissions through Minister of Education and Culture Regulations. The zoning system is part of the school reform effort to improve the quality of education in Indonesia. According to Mardiasmo there are principles of good government governance, as follows: Accountability (Accountability), Transparency (Transparancy), Democracy (Democraton), Rule of Law. The benefits of PPDB online Zoning System are that it is more efficient, makes it easier for the community, improving the quality of education and there are also positive and negative impacts in the application In this study, implementing that the process of Implementing New Student Admissions (PPDB) conducted online Zoning in the city of Surabaya has been considered successful in efforts to express access and quality of education.*

**Keywords:** *PPDB Online, Zonung System, Good Governance*

### **PENDAHULUAN**

Secara normatif, Indonesia menerapkan program wajib belajar 12 tahun, kombinasi SD (6 tahun), SMA (3 tahun) dan SMA (3 tahun). Tujuan utama dari program wajib belajar 12 tahun ini adalah untuk membangun tenaga kerja Indonesia yang produktif yang dapat menjawab kebutuhan pasar akan sumber daya yang terampil untuk menghadapi persaingan ekonomi global.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan adalah dengan mengeluarkan kebijakan baru tentang penerimaan siswa baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi. Sistem zonasi

merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, membuat siswa tidak hanya berbondong-bondong ke sekolah favoritnya karena mau tidak mau harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar di sekolah yang jauh, meskipun berstatus favorit (Prathama and Bagadjati, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam PPDB merupakan langkah nyata untuk mendorong terciptanya *good governance* di bidang pendidikan. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi Bank Dunia, *Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, selaras

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administrasi, menerapkan disiplin penganggaran dan menciptakan kerangka kebijakan untuk pertumbuhan kegiatan usaha (World Bank, 1994). Menurut Sedarmayanti (2004) *good governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita bernegara. PPDB dipilih karena menjadi masukan awal dalam proses manajemen pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Jika input tersebut dikelola dengan baik, diharapkan proses lanjutannya dapat berjalan dengan baik. Tata pemerintahan yang baik berorientasi pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Lascoumes and Le Gales, 2007). Sehingga jika pelaksanaan program PPDB online efektif dan efisien dapat tercipta *good governance* di bidang Pendidikan.

Penerapan PPDB *online* harus diikuti pula dengan bagi orang tua siswa yang hendak mendaftarkan putra atau putri mereka. Sosialisasi atau edukasi ini berkaitan erat dengan kendala teknis yang kemungkinan akan dihadapi para orang tua. Sementara, pendaftaran baru yang selama ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung mulai dikurangi dengan penerapan PPDB *online* yang merupakan cara atau sistem yang baru diterapkan beberapa tahun belakangan. Sistem PPDB *online* berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi wali murid dan calon murid untuk dapat melaksanakan pendaftaran ke sekolah-sekolah dengan aman dan tertib dengan menyediakan fitur otomatis proses PPDB *Online* secara langsung menggunakan media internet, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga hasil penerimaan siswa secara langsung nyata melalui internet (Abidin, 2018).

Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa sistem PPDB sebelumnya, yang menggunakan ujian sebagai dasar seleksi penerimaan, cenderung menerima siswa capaian akademik yang relatif tinggi yang

umumnya berasal dari keluarga mampu. menunjukkannya, siswa dengan kemampuan rendah, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, gagal di sekolah swasta atau bahkan berisiko di sekolah.

Jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah umum tidak merata jika dibandingkan dengan sebaran tempat tinggal calon siswa. Dalam zonasi PPDB, kondisi ini merugikan calon siswa yang domisilinya relatif jauh dari sekolah negeri di sekitarnya. Satu-satunya peluang lain bagi calon siswa ini untuk mendaftar di sekolah umum adalah menempuh jalur kuota prestasi yang hanya 5% dari total kuota.

Tujuan dari sistem zonasi PPDB online adalah untuk menganalisis penerapan PPDB online sistem zonasi kota Surabaya dari perspektif *good governance*, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dalam penerapan sistem zonasi PPDB online.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Setelah mendapatkan data, Langkah yang dilakukan adalah menganalisis data dengan menggunakan *interactive model* (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Analisis data menggunakan, penyajian data. Setelah penyajian data adalah reduksi data kemudian penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan sistem zonasi di Indonesia terinspirasi dari negara lain yang lebih dulu menerapkannya. Pada tahun 1940-an, prinsip rekrutmen mahasiswa berdasarkan letak geografis diterapkan di negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa menganggap bahwa persaingan pasar dalam dunia pendidikan menyebabkan persaingan tidak sehat antar sekolah; membangun kasta untuk sekolah dan memperburuk situasi sekolah yang sejak

awal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengejar ketinggalan. Parahnya lagi, korban persaingan adalah anak-anak dari keluarga kelas bawah karena tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Dalam situasi ini, kebijakan zonasi dianggap agar terjadi pemerataan pendidikan sehingga semua kelas sosial memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (Coughlan, 2018).

Tidak hanya di Eropa, penerapan sistem zonasi dalam pendidikan juga diterapkan di Amerika dan Asia. Sistem zonasi banyak diterapkan karena kemampuannya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan secara objektif di negara-negara tersebut. Demikian pula di Indonesia, zonasi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di beberapa daerah. Argumentasi penerapan sistem zonasi seringkali mengacu pada fenomena sukses di negara-negara maju di atas. Namun, yang sering diabaikan adalah kondisi implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks kebijakan lain yang lebih luas (Wahyuni, 2018).

Menurut Coughlan (2018) menjelaskan bahwa sistem zonasi yang berkembang di negara-negara tersebut tidak berjalan sendiri. Seiring dengan perubahan besar pada sistem penerimaan, negara-negara ini juga mempercepat peningkatan kapasitas guru dan penyediaan fasilitas di lembaga pendidikan. Pemerintah juga mendorong persaingan antara pendidikan negeri dan swasta agar sekolah terus berinovasi dalam pengembangannya sendiri. Di Finlandia, misalnya, semua sekolah bahkan memiliki fleksibilitas untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran dan tidak ada standarisasi nilai yang ketat di semua unit pendidikan. Kebijakan reformasi pendidikan lainnya yang mengiringi sistem zonasi di

Indonesia mungkin belum banyak diketahui masyarakat, sehingga sistem zonasi sebagai pembatasan hak dapat menjadi bagian dari campuran kebijakan pendidikan yang lebih besar.

Pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan penuh pertimbangan manfaat dan konsekuensi. Menteri pendidikan menyatakan bahwa semua anak bangsa memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada diskriminasi, eksklusivisme, dan persaingan yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah umum sebagai pelayanan publik harus mampu menciptakan pendidikan dengan nilai-nilai ideal di atas (Locatelli, 2018). Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, lembaga atau sekolah harus memiliki ciri universalitas, yaitu semua golongan harus dapat mengaksesnya (*non-excludable*), tidak ada persaingan yang ketat (*non-rivalry*) dan tidak ada diskriminasi (*non-diskriminasi*) (Locatelli, 2016).

Tata kelola yang baik menurut Bank Dunia lebih menekankan pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Definisi *governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2006) mendefinisikan *governance* sebagai “pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa di semua tingkatan”.

Menurut Mardiasmo (2006) terdapat prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab (*Responsibility*),
- 2) Transparansi,
- 3) Demokrasi,
- 4) Negara Hukum (*Rule of Law*).

Melihat berbagai persoalan dan fakta bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan baru, sebenarnya kita harus menyadari bahwa pelanggaran telah terjadi dalam skala yang begitu masif. Namun, yang paling berbahaya adalah kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemerintah. Mengingat bahwa pendidikan merupakan kunci mobilitas sosial dan karenanya sangat penting bagi masyarakat. Kegagalan pemerintah mengantisipasi masalah yang timbul dari zonasi akan membuat masyarakat sangat kecewa.

Masalah utama penerapan sistem zonasi adalah kurangnya kesiapan beberapa elemen kunci seperti siswa, orang tua dan sekolah (*readiness for change*). Seharusnya, sistem yang dibuat pemerintah ini sejalan dengan kesiapan seluruh pelaku pendidikan, seperti tim pengelola sekolah, Kemendikbud selaku penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terkena dampaknya. Memang masih terdapat kesenjangan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pengajar antar sekolah di perkotaan dan daerah.

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, melalui surat pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Akuntabilitas dalam sistem zonasi PPDB dapat diberikan kepada masyarakat, baik dari segi proses, prosedur maupun hasil. PPDB di Surabaya juga tidak bisa dihitung, dimana masih ada ratusan wali yang melayani Dinas Pendidikan Kota Surabaya

pada hari kedua pengajuan PPDB SMP dengan jalur zonasi reguler di Surabaya.

Hari kedua pendaftaran PPDB SMP melalui zonasi reguler masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Orang tua atau wali siswa meminta penjelasan mengapa nama anak tersebut dicoret dari sistem, padahal rumahnya hanya berjarak 700meter dari sekolah. Beberapa bahkan memiliki skor tinggi dan dekat dengan rumah, tetapi mereka belum diterima. Oleh karena itu, Sekda lebih detail dalam informasi tentang hasil yang diungkapkan, artinya informasi tersebut dijadikan bahan untuk mengadu, misalnya informasi tersebut juga diperlukan masyarakat untuk memantau pertanggungjawaban PPDB (Werdiningsih, 2020).

### **2. Transparansi**

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan kepada publik dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus dibarengi dengan kemudahan bagi publik untuk memperoleh informasi tersebut (Kristiansen *et al.*, 2009).

Pelaksanaan PPDB harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua atau wali siswa, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Namun untuk PPDB *Online*, Sistem Zonasi di Surabaya tahun 2019 masih belum transparan, dibuktikan dengan banyaknya orang tua yang mengeluh dan pulang dengan tangan hampa, tanpa mendapatkan *Personal Identification Number* (PIN). Sehingga, pendaftaran dimulai dengan pengambilan nomor PPDB berupa PIN untuk calon siswa.

Banyak orang tua atau wali siswa pulang dengan tangan hampa karena belum bisa mendapatkan PIN untuk mendaftar di sekolah, meski sudah berjam-jam mengantre. Sistem saat ini harus disederhanakan dan diperjelas, serta lebih transparan, saat menggunakan sistem zonasi.

### 3. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum (Mardiasmo, 2006). Indikator ini harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara tanpa terkecuali dalam proses pengambilan keputusan pemberlakuannya suatu kebijakan yaitu pemberlakuan “PPDB *ONLINE*”. Sebelum pemberlakuan kebijakan ini pemerintah harus melakukan survei masyarakat atas pengambilan keputusannya atau melakukan uji coba terlebih dahulu pada salah satu daerah di Indonesia. Jika pada saat proses uji coba ternyata lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif dan banyaknya penolakan dari masyarakat atas kebijakan ini maka pemerintah harus mempertimbangkan lagi untuk meneruskan kebijakan tersebut.

Demokrasi dalam pemberlakuan PPDB *Online* lebih terkait dengan alur, syarat dan cara pendaftarannya dimana banyak sekali pro kontra yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut banyak dari masyarakat kontra dengan kebijakan ini dikarenakan pemberlakuan sistem zonasinya banyak dari masyarakat tidak setuju jika tidak dapat mendaftar ke sekolah favorit tujuan mereka karena jauh dengan sekolah tersebut (Ula and Lestari, 2019).

Selain itu kontra lainnya, dari masyarakat terkait kebijakan ini terkait dengan sistem tatacaranya dimana semuanya dilakukan secara sistem online sedangkan di Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang mayoritas masyarakat merupakan kelas menengah kebawah banyak dari mereka yang belum memanfaatkan sistem digital dengan baik disinilah peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi pelatihan terlebih dahulu agar tidak terkesan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

### 4. Aturan Hukum

Hukum sebagai kumpulan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diterapkan dengan sanksi. Hukum sebagai kumpulan atau aturan memiliki muatan umum dan normatif, umum karena berlaku untuk semua orang dan normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh atau harus dilakukan dan bagaimana melaksanakan kepatuhan terhadap aturan.

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Negara hukum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga lembaga-lembaga negara dan ketatanegaraan dalam menjalankan fungsinya selalu dilandasi oleh keyakinan untuk berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkait kebijakan Sistem Zonasi Online PPDB sesuai Permendikbud Nomor 51/2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Pelajaran 2019/2020. Sementara itu, Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) 2020 baru melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Permendikbud ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019. Pasal ini mengatur

tentang persyaratan, jalur pendaftaran calon mahasiswa baru. pelaksanaan PPDB (Pendaftaran, Seleksi, dan Pengumuman). Selain itu juga mengatur pendataan ulang, pemindahan siswa, pelaporan dan pengawasan, hingga sanksi.

Pendaftaran PPDB Surabaya dilakukan melalui website resmi [ppdb-surabaya.net](http://ppdb-surabaya.net), selanjutnya peserta dapat mengikuti petunjuk pendaftaran seperti yang telah dijelaskan, namun apabila informasi yang diberikan kurang dipahami dan terdapat ketidaksesuaian, jangan khawatir, masyarakat disarankan untuk langsung mengunjungi website <http://da0f59.ppdb-surabaya.net/umum/prosedur>, kemudian ikuti petunjuk pendaftaran di website dan pastikan pendaftaran PPDB Kota Surabaya sudah dibuka sesuai jadwal <http://da0f59.ppdb-surabaya.net/umum/jadwal>.



Gambar 1. PPDB Online Kota Surabaya  
Sumber : <https://surabaya.siap-ppdb.com/>

Rapuhnya teknis penerapan sistem zonasi menimbulkan efek samping berupa kekecewaan besar, karena keinginan untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit tidak tercapai karena berasal dari luar zona. Sekolah yang awalnya menjadi tujuan utama anak-anak memilih sekolah karena label favoritnya semakin menipis peminatnya, bahkan di beberapa sekolah kuota pendaftaran tidak terpenuhi karena jumlah siswa di daerah tersebut sedikit. Pada

dasarnya, baik pro maupun kontra memiliki alasan masing-masing berdasarkan sudut pandang pribadi masing-masing karena memiliki perspektif yang berbeda. Apapun persepsi publik saat ini, kondisi riil yang harus dihadapi adalah mengikuti peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, baik pro maupun kontra, apapun sikap Anda terhadap politik (Arifuddin *et al.*, 2019).

Pelaksanaan PPDB dalam hal ini dapat dikatakan efisien, tidak hanya dari segi waktu pelaksanaan. Tapi Anda bisa melihat efektivitas biaya atau dananya. Jika Anda menggunakan PPDB online, sumber daya yang dikeluarkan akan lebih ditekan. Jika dibandingkan dengan mekanisme yang biasa digunakan, PPDB *online* lebih menguntungkan. Selain itu, perusahaan Teknologi Informasi (TI) seperti Telkom memberikan dukungan dan layanan online untuk setiap sekolah. Tergantung bagaimana sekolah atau satuan pendidikan yang berada di bawah naungan layanan tersebut menggunakannya. Beberapa bahkan menyediakan layanan ini secara gratis. Dengan demikian, sekolah hanya merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam proses seleksi calon siswa.

Dari sisi masyarakat, pengembangan PPDB *online registry* di Surabaya juga sangat sulit. Setiap lapisan masyarakat gadget bukanlah hal baru. Sebagian besar pasti menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diterapkannya PPDB online ini, masyarakat (dalam hal ini orang tua siswa) tidak diwajibkan untuk bersekolah di sekolah pilihannya. Karena hanya melalui gadget Anda bisa memilih dan langsung mengikuti perkembangan PPDB. Mekanisme online ini juga mendorong proses seleksi yang jujur, adil dan terbuka. Karena dilakukan dengan sistem online yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan

tidak akan ada kebohongan dan penipuan. Selain itu juga menuntut masyarakat untuk melek teknologi, agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman yang sangat pesat.

Dalam memberikan mekanisme online di PPDB, tentunya dibutuhkan pihak ketiga sebagai penyelenggara. Secara tidak langsung hal ini memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan PPDB ini. karena dapat meminimalisir terjadinya penipuan terhadap keamanan data yang diperoleh.

Dengan demikian, pengelolaan data yang masuk ke sistem akan dikelola dengan baik dan keamanan serta kebenarannya akan terjamin. Oleh karena itu, proses tersebut sangat mampu membuat data input lebih cepat didistribusikan ke publik. Pembaruan data terus berjalan setiap detik dan dapat diubah kapan saja. Sangat minim error terjadi pada *record* PPDB *online* Surabaya bila menggunakan mekanisme seperti ini.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang cepat menjadi salah satu keuntungan menggunakan sistem ini. Menggunakan layanan online seperti ini adalah suatu keharusan. Juga, teknologi yang arusnya tak terbendung lagi. Orang yang paling pintar mengkritik masyarakat akan mencari bukti.

PPDB *online* ini dapat menjadi bukti nyata bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah. Meski pada kenyataannya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Kaitan kunci dari sistem ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, sehingga merupakan proses bertahap untuk menjamin kualitas pendidikan di negeri ini.

Kualitas sangat ditentukan dari segi pelayanan yang diberikan. Pemanfaatan teknologi dalam pendaftaran online PPDB Surabaya jelas merupakan peningkatan dari

segi layanan sekolah atau satuan pengajaran. Orang-orang lelah berdiri dalam antrean berjam-jam dan menunggu giliran untuk berdiri. penggunaan sistem ini jelas jauh dari kesan ini. Karena Anda bisa langsung memantaunya dari jauh atau dari rumah Anda untuk bersantai.

Bagi sekolah dan guru akibat penerapan sistem zonasi antara lain;

- 1) sebagian guru mengeluh banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori)
- 2) Semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, berkelahi, tidak mengenakan atribut lengkap dll.
- 3) Daya juang siswa rendah sehingga banyak siswa yang menganggap remeh guru misalnya menunda-nunda tugas yang diberikan
- 4) Terjadi banyak perkelahian di luar sekolah karena paham seluk beluk lingkungan
- 5) Pengawasan orang tua beum efektif meskipun jarak sekoah dekat
- 6) Prestasi sekolah menurun. Paparan di atas adalah dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan oleh guru dan sekolah (Muammar, 2019).

Menurut penelitian Suardita I Putu Andika (2019) sistem zonasi yang dirasakan masyarakat meliputi:

- 1) Dianggap tidak adil bagi siswa yang berhasil karena akan lebih sulit masuk ke sekolah yang dicita-citakannya
- 2) Daya juang siswa menurun karena untuk masuk ke sekolah favorit tidak perlu nilai yang bagus
- 3) Harga rumah di sekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang mencari rumah yang dekat dengan sekolah favoritnya.

- 4) Adanya manipulasi kependudukan oleh oknum wali murid agar anaknya dapat bersekolah di sekolah favoritnya
- 5) Belum meratanya pemerataan jumlah sekolah umum dan sarana pendidikan yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan ruang di beberapa kecamatan.
- 6) Konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat, terbukti dengan banyaknya kasus perubahan dan manipulasi KK (Kartu Keluarga)
- 7) Konsep penerapan sistem zonasi belum jelas, sehingga ada beberapa orang tua yang mengeluhkan jarak dari sekolah masih jauh meskipun mengikuti jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat

## PENUTUP

Berdasarkan data-data di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan Zonasi PPDB online di Kota Surabaya dinilai berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Bahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan tidak akan mengubah secara signifikan teknis zonasi PPDB tahun 2020. PPDB yang diwujudkan dengan sistem online itu sebenarnya merupakan kecanggihan yang dikembangkan dengan basis teknologi. maju, sehingga juga lebih mudah bagi sekolah untuk memantau PPDB secara mandiri.

Sebaran siswa dari segi jarak yang didekati dan dari segi kualitas masuk juga tersebar di beberapa sekolah. Proses seleksi ini mengutamakan aspek penilaian kemampuan akademik dan bakat mahasiswa yang masuk. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah agar sesuai dengan standar nasional, sehingga masyarakat tidak perlu bingung dalam memilih sekolah favorit jika semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Idealnya, perubahan kebijakan akan melalui proses evaluasi, sehingga kebijakan baru

memperbaiki dan memperbaiki kekurangan kebijakan lama dan tidak menimbulkan masalah baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2018) 'Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di Smp Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya', *Pendidikan Islam*, 7(1).
- Arifuddin, I. *Et Al.* (2019) 'Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan', *Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn) 2019*, 1(1).
- Coughlan, R. W. (2018) 'Divergent Trends In Neighborhood And School Segregation In The Age Of School Choice', *Peabody Journal Of Education*, 93(4). Doi: 10.1080/0161956x.2018.1488385.
- Kristiansen, S. *Et Al.* (2009) 'Public Sector Reforms And Financial Transparency: Experiences From Indonesian Districts', *Contemporary Southeast Asia*, 31(1). Doi: 10.1355/Cs31-1c.
- Lascoumes, P. And Le Gales, P. (2007) 'Introduction: Understanding Public Policy Through Its Instruments - From The Nature Of Instruments To The Sociology Of Public Policy Instrumentation', *Governance*. Doi: 10.1111/J.1468-0491.2007.00342.X.
- Locatelli, R. (2016) 'Education As A Public And Common Good: Reframing The Governance Of Education In A Changing Context', *Unesco*, (March).
- Mardiasmo (2006) 'Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance', *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M. And Saldana, J. (2014) 'Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook', *Ca, Us: Sage Publications*.



- Muammar, M. (2019) 'Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram', *El Midad*, 11(1). Doi: 10.20414/Elmidad.V11i1.1904.
- Prathama, A. And Bagadjati, W. (2019) 'Implementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo - Kota Surabaya)', *Public Administration Journal Of Research*, 1(1). Doi: 10.33005/Paj.V1i1.11.
- Sedarmayanti (2004) *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju.
- Suardita I Putu Andika, I. K. P. (2019) 'Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah', *Kertha Patrika*, 41(Vol 41 No 3 (2019)).
- Ula, D. M. And Lestari, I. (2019) 'Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat', *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*.
- Wahyuni, D. (2018) 'Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru', *Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, X.
- Werdiningsih, R. (2020) 'Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan', *Public Service And Governance Journal*, 1(2).
- World Bank (1994) *Governance: The World Bank's Experience*, World Bank.